

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aspinall, E., & Berenschot, W. 2019. *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Cornell University Press.

Aspinall, E., & Sukmajati, M. 2015. *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta. PolGov.

Halim, A. 2014. "Politik lokal: pola, aktor & alur dramatisasinya: perspektif teori *Powercube*, modal dan panggung". *Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B)*.

Marsh, D., & Stoker, G. 2010. *Teori dan metode dalam ilmu politik*. Bandung: Nusa Media.

Robert K. Yin. 2005. *Studi Kasus Design & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi dan Jurnal

Afandi, Eka Kurniasari. 2016. "Faksionalisasi Ormas Pemuda Pancasila Dalam Tim Sukses Prabowo-Hatta di Pilpres Tahun 2014". *Jurnal Politik Muda*. Vol 5.

Amin, Muryanto. 2013. *Kekuasaan dan Politik Lokal (Studi Tentang Peran Pemuda Pancasila Dalam Mendukung Syamsul Arifin dan Gatot Pudjonugroho Sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2008-2013)*. Disertasi. Universitas Indonesia

Andhika, L. R. 2017. "Bahaya Patronase dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak". *Jurnal UNPAD*.

Berenschot, W. 2018. The Political Economy of Clientelism: a Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563-1593.

- Fariz, M. W. 2017. "Politik Balas Budi: Hubungan Pemuda Pancasila dan Demokrat dalam Mobilisasi Massa Pada Pilkada Surabaya tahun 2015". *Jurnal Politik Muda*, 6(2).
- Hanif, Hasrul. 2009. "Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi di Indonesia." *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 12.(3): 327-351.
- Iqbal, Muhammad. 2017. "Peran Pemuda Pancasila dalam Mendukung Pencalonan Kepala Daerah (Studi tentang, Kemenangan Pangonal Harahap dan Andi suhaimi Dalimunthe Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2015)". *Skripsi. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara*.
- Karina, N. 2008. *Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara*. Tesis. Universitas Sumatera Utara (USU)
- Nur Ramadhan, M. & Berlianto, J. D. 2019. "Klientelisme Sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal". *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1): 2615-7977. 169-180.
- Pratama, R. A. 2017. "Patronase, Klientelisme dan Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 2(1).
- Rofieq, A. & Nuryono, R. 2016. "Pengaruh Klientelisme terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat Kecamatan Sukatani pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2012". *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2). 105-119.
- Scott, James C. 1972. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia". dalam *The American Political Science Review*. Vo. 6. No. 1 (Mar. 1972).

Sumber Online/Internet dan Undang-undang

https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/penetapan/t1/sumatera_utara, diakses pada tanggal 5 Maret 2019

<https://news.okezone.com/read/2018/02/26/340/1864985/ormas-pemuda-pancasila-deklarasi-dukung-edy-rahmayadi-musa-rajekshah>, diakses pada tanggal 20 November 2018.

<http://www.antaraneews.com/berita/460818/tujuh-gelombang-pilkada-serentak-2015-hingga-2027>. Diakses pada 08 Oktober 2018.

<http://www.antaraneews.com/berita/460818/tujuh-gelombang-pilkada-serentak-2015-hingga-2027>. Diakses pada 08 Oktober 2018

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/petahana>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2019

<http://balitbang.labuhanbatukab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/rpjmd-Kab.Labuhanbatu-2016-2021.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/kronologi-ott-bupati-labuhanbatu-pangonal-harahap>. Diakses pada 20 Oktober 2019

<https://www.tuntasonline.com/2019/09/20/plt-bupati-labuhanbatu-resmi-definitif>. Diakses pada 20 Oktober 2019

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pemuda Pancasila
Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu: *“Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka Tahun 2018”*

Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 TAHUN 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang